

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis yang dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip tertentu. Menurut Hartatiningsih (2004:5) prinsip yang mendasarinya antara lain “transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas”. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dibutuhkan sumber daya aparatur yang bermutu dan profesional. Oleh karena itu, setiap organisasi pemerintah berupaya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi yang tinggi, sebab SDM yang berkompeten menjadi syarat unggulan organisasi sekaligus pendukung daya saing organisasi dalam memasuki globalisasi yang kompetitif dan dinamis. Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu dilakukan suatu pembinaan yang sifatnya berkelanjutan terhadap pegawai negeri sipil yakni dari sejak pertama diangkat sebagai Calon

Pegawai Negeri Sipil sampai menjelang pensiun. Salah satu bentuk pembinaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil adalah melalui program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil ini merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

Pendidikan dan Pelatihan menjadi penting untuk mewujudkan aparatur yang kompeten dan profesional, agar mampu menghasilkan kinerja optimal melalui transformasi pengetahuan, sikap dan keterampilan tertentu agar memenuhi syarat dan cakap dalam melaksanakan pekerjaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang tujuan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS memuat bahwa:

- a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.
- b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan amanat PP 101 Tahun 2000 tersebut maka seorang CPNS harus mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang

salah satunya adalah Pendidikan dan Pelatihan. Diklat berfungsi untuk peningkatan kemampuan Pegawai Negeri Sipil terutama dalam bidang pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. Lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Jawa Barat sesuai dengan yang tercantum diatas adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur daerah yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan diklat serta pengembangan sistem diklat dituntut untuk lebih berperan aktif dalam mendukung program pemerintah di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur yang tangguh dan dapat memberikan kontribusi positif dalam tugas pekerjaan yang dihadapinya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan pengembangan program pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan II.

Dalam sistem kediklatan, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh lembaga diklat untuk mengetahui keefektifan/ keberhasilan sebuah program pelatihan. Hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat dijadikan *feed-back* dalam memperbaiki dan menyempurnakan program diklat. Pada dasarnya evaluasi bertujuan untuk memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan dalam program secara keseluruhan.

Evaluasi sebagai sub sistem dari manajemen diklat memiliki peran yang sangat penting untuk mengukur dan menentukan keberhasilan mutu penyelenggaraan diklat. Di sisi lain, evaluasi diklat hasilnya bukan hanya sekedar mengukur tingkat akademik dan perilaku para peserta, tetapi juga untuk kepentingan organisasi terutama dalam memberikan informasi kepada pimpinan sebagai bahan utama dalam membuat kebijakan kebutuhan diklat dimasa yang akan datang.

Pada kenyataannya sesuai dengan hasil pra survey yang peneliti lakukan di lembaga diklat tersebut, ternyata belum ada evaluasi program pada Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II. Sementara ini evaluasi hanya sebatas evaluasi hasil belajar dan panitia tidak melakukan perbaikan atas program sebelumnya. Tentu saja hal ini belum dapat menggambarkan keberhasilan program secara komprehensif. Mengingat diklat ini diwajibkan untuk seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan diadakan setiap tahun, kegiatan evaluasi program sangatlah penting dilakukan. Tanpa adanya evaluasi, keberhasilan dan kegagalan program tidak dapat diketahui.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian yang bersifat evaluatif, yaitu jenis penelitian yang menilai program secara keseluruhan berdasarkan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Peneliti menentukan model evaluasi CIPP sebagai model yang digunakan untuk mengevaluasi program karena peneliti akan menganalisis program diklat Prajabatan Golongan II berdasarkan komponen-komponennya sehingga evaluasi terhadap program Prajabatan Golongan II lebih komprehensif.

Komponen evaluasi *Context* merupakan upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan tujuan program diklat Prajabatan Golongan II. Komponen evaluasi *Input* merupakan upaya untuk mengevaluasi kemampuan awal peserta diklat, panitia penyelenggara diklat, dan tim widyaiswara. Komponen evaluasi *Process* diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Komponen evaluasi *Product* diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Evaluasi *Product* merupakan tahap akhir dari serangkaian evaluasi program.

Berdasarkan uraian-uraian di atas cukup jelas bahwa evaluasi program merupakan upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu program secara cermat dengan cara mengetahui efektifitas/keberhasilan masing-masing komponennya. Kegiatan evaluasi program ini mengacu pada tujuan, dengan kata lain tujuan tersebut dijadikan ukuran keberhasilan. Sesuai dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana keberhasilan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II (Prajab II) di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dirasa penting oleh penulis karena wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari evaluator/peneliti untuk pengambilan keputusan (*decision maker*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengajukan masalah penelitian “Bagaimana keberhasilan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat?”

Penelitian ini berusaha melihat keberhasilan Program Diklat Prajabatan Golongan II, dilihat dari aspek secara keseluruhan. Secara lebih rinci berikut dijabarkan menjadi sub masalah:

1. Bagaimana keberhasilan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dilihat dari komponen *Context*?
2. Bagaimana keberhasilan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dilihat dari komponen *Input*?
3. Bagaimana keberhasilan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dilihat dari komponen *Process*?
4. Bagaimana keberhasilan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dilihat dari komponen *Product*?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan Program Diklat Prajabatan Gol II di di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui keberhasilan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dilihat dari komponen *Context*.
2. Mengetahui keberhasilan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dilihat dari komponen *Input*.
3. Mengetahui keberhasilan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dilihat dari komponen *Process*.

4. Mengetahui keberhasilan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dilihat dari komponen *Product*.

Beberapa masukan/ rekomendasi penting dalam penelitian ini sekiranya dapat dijadikan pedoman bagi penentu kebijakan dalam hal ini Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dapat memberikan keputusan terhadap program tersebut.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian evaluatif tentang program Prajabatan Golongan II di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- 1. Lembaga yang diteliti (Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat)**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada lembaga, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan perangkat pendukung lembaga lainnya dalam penyelenggaraan program Prajabatan Golongan II.

- 2. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan**

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pendidikan yang berkaitan dengan evaluasi program diklat yang lebih baik dan produktif.

3. Peneliti

Memberikan gambaran dan wawasan pengetahuan yang lebih dalam serta menjawab rasa keingintahuan peneliti mengenai keberhasilan program Prajabatan Golongan II dilihat dari aspek *Context*, *Input*, *Process* dan *Product* di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan agar lebih memahami isi yang terkandung dalam penelitian dan judul skripsi, maka perlu menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penelitian Evaluatif

Penelitian Evaluatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menilai keberhasilan Program Diklat Prajabatan Golongan II berdasarkan kriteria tertentu menggunakan evaluasi CIPP. Model Evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dengan demikian peneliti menganalisis program berdasarkan komponen-komponennya. CIPP adalah singkatan dari huruf awal dari empat buah kata yaitu, *Context*, *Input*, *Process*, *Product*.

Kriteria dalam penelitian ini adalah Panduan Diklat Prajabatan Golongan II yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan program diklat Prajabatan Golongan II diantaranya meliputi latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran, kompetensi, kurikulum, strategi pembelajaran dan tata tertib.

2. Diklat Prajabatan Golongan II

Diklat Prajabatan Golongan II adalah sebuah pendidikan dan pelatihan yang harus diikuti oleh CPNS. Diklat Prajabatan Golongan II bepesertakan CPNS yang dinyatakan dengan SK Pengangkatan CPNS dan memiliki ijazah SLTA, D1, D2, D3 dan sederajat.

